



# **LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2020**

**INSPEKTORAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**Jln. Dewi Sartika No. 47 Palu**



## BAB. I PENDAHULUAN

### 1.1.LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dan evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran, kesemuanya terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ), selain sebagai bahan kebijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektur selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Inspektorat sebagai subsistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Daerah Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 disusun agar :

1. Memberikan informasi capaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan tolok ukur dari RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Mendorong Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.



## 1.2. STRUKTUR ORGANISASI

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah nomor : 12 Tahun 2014, tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 42 tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Inspektorat dipimpin oleh Inspektur, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretaris dan para Inspektur Pembantu serta Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tergambar dalam Struktur Organisasi berikut :

**Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**  
(sesuai Peraturan Gubernur No 16 Tahun 2015)



### 1. 3. TUGAS DAN FUNGSI

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 42 tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah provinsi, dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
- d. Pengoordinasian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam rangka pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah provinsi dan kabupaten/kota; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain dibidang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan yang diberikan oleh Gubernur.

### 1. 4. ISU STRATEGIS INSPEKTORAT

Isu Strategis yang berkaitan dengan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya dihadapkan pada beberapa hal berikut :

1. Masih banyaknya temuan-temuan yang berindikasi TPK (Hasil Pemeriksaan BPK RI), Inspektorat yang belum di tindak lanjuti;
2. Masih belum terbangunnya infrastruktur yang mendukung penerapan SPIP;
3. Masih kurangnya kesadaran OPD dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
4. Belum tertibnya pengelolaan barang milik daerah di OPD;
5. Masih belum optimalnya OPD dalam menerapkan SAKIP;
6. Belum optimalnya kompetensi SDM pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Masih banyaknya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh OPD.



## 1. 5. KEADAAN PEGAWAI

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai Pegawai per 31 Desember 2018 berjumlah 81 orang, dapat digambarkan dalam tabel berikut :

**Tabel 1.2**  
**PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan**  
**Tahun 2020**

No.	Klasifikasi Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	S2	38	
2.	S1	48	
3.	D3	3	
4.	SLTA	11	
5.	SLTP	-	
6.	SD	-	
<b>Jumlah</b>		<b>100</b>	

**Tabel 1.3**  
**Jumlah PNS**  
**Berdasarkan Golongan/Ruang**  
**Tahun 2020**

No.	Golongan	R u a n g					Jumlah
		A	B	C	D	E	
1.	Golongan IV	13	10	1	1	-	25
2.	Golongan III	9	22	20	19	-	70
3.	Golongan II	-	-	3	2	-	5
4.	Golongan I	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>							<b>100</b>

**Tabel 1.4**  
**PNS Berdasarkan Jabatan**  
**Tahun 2020**

No.	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1.	Struktural	6	
2.	Umum	37	
3.	Auditor	30	
4.	P2UPD	27	
<b>Jumlah</b>		<b>100</b>	

**Tabel 1.5**  
**Jumlah Jabatan Fungsional**  
**Tahun 2020**

No.	Jabatan Fungsional	Jumlah	Keterangan
1.	Auditor Madya	6 Orang	
2.	Auditor Muda	19 Orang	
3.	Auditor Pertama	4 Orang	
4.	Auditor Penyelia	1 Orang	
5.	Auditor Pelaksana	1 Orang	
6.	P2UPD Madya	10 Orang	
7.	P2UPD Muda	11 Orang	
8.	P2UPD Pertama	5 Orang	
<b>Jumlah</b>		<b>57 orang</b>	

Berdasarkan Rekomendasi Temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 bahwa jumlah ideal tenaga fungsional Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebanyak 67 (enam puluh tujuh) orang sedangkan kondisi yang ada hanya sebanyak 57 (lima puluh tujuh) orang. Sampai dengan akhir tahun 2020 belum mencapai sesuai rekomendasi atas temuan BPK tersebut, dengan demikian masih membutuhkan tenaga fungsional sebanyak 10 (sepuluh) orang baik dari Auditor maupun P2UPD dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

#### **1.6. KEADAAN SARANA DAN PRASARANA**

Selain Sumber Daya Manusia yang ada, sebagai salah satu faktor pendukung tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki Sarana dan Prasarana yang mendukung beban Kerja Aparatur Sipil Negara adapun asset sarpas yang hilang adalah 2 (Dua) Unit kendaraan Roda 2 sesuai dengan tabel 1.6 dibawah ini, yaitu :



**Tabel 1.6**  
**Sarana dan Prasarana**

No	Jenis Sarana/Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Kendaraan Roda 4	7	
2	Kendaraan Roda 2	15	
3	Komputer yang dapat digunakan	20	
4	Laptop yang dapat digunakan	69	
5	<i>IPad</i>	4	
6	AC yang dapat digunakan	50	
7	<i>Infocus</i>	3	

Jumlah sarana dan prasarana yang ada dapat mendukung beban kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan baik di tingkat Inspektur Pembantu maupun di Sekretariat masih kurang memadai mengingat jumlah beban kerja dan sarana yang ada tidak seimbang.

### **1.7. KEUANGAN**

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun Anggaran 2020 mengelola dana APBD sebesar Rp.17.272.523.831,55 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 12.310.641.352,55 dan Belanja Langsung Rp. 4.961.882.479,00

### **1.8 SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai struktur, fungsi dan tugas organisasi, keadaan pegawai, sarana dan prasarana, keuangan serta sistematika laporan kinerja instansi pemerintah.

#### **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Bab ini menguraikan :

- a. Perencanaan strategis organisasi mengenai :  
Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis serta Rencana Kegiatan Tahunan dalam mencapai sasaran strategis organisasi.
- b. Penetapan Kinerja :  
Perjanjian Kinerja Tahun 2020



c. Rencana Anggaran :

Target Belanja, Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menguraikan mengenai Capaian Kinerja Tahun 2020, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Realisasi Anggaran.

### BAB IV PENUTUP

INSPEKTORY

## BAB. II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

#### 2.1.1. VISI DAN MISI

Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN) serta mampu bersaing di bidang pengawasan, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah harus terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan kinerja. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada perubahan paradigma dari keberhasilan input menjadi tercapainya keseimbangan output dengan outcome. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan Renstra Tahun 2017-2021, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan **VISI** sebagai berikut :

***“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik dan Bersih, Efisien dan Efektif, Transparan dan Akuntabel melalui peran Aparat Pengawasan yang Profesional”.***

Berkaitan dengan visi tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan **MISI** sebagai berikut :

1. ***Meningkatkan pembinaan dan Pengawasan fungsional secara professional terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.***
2. ***Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD .***
3. ***Meningkatkan prosentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal.***



## **2.1.2. Tujuan dan Sasaran Strategis**

### **2.1.2.1. Tujuan**

Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka menengah selama 5 (lima) tahun anggaran adalah :

#### **Tujuan I :**

*Terselenggaranya Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dan Aset yang Efektif dan Efisien dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.*

#### **Sasaran I :**

*Terselenggaranya pengawasan pengelolaan keuangan dan aset yang efektif dan efisien.*

#### **Tujuan II :**

*Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SAKIP di Lingkungan Pemda Sulawesi Tengah.*

#### **Sasaran II :**

*Terwujudnya SAKIP yang efektif di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.*

#### **Tujuan III :**

*Mempercepat Proses Penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan APEP.*

#### **Sasaran III :**

*Terwujudnya Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal.*

### **2.1.2.2. Sasaran Strategis**

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1.**  
**Sasaran Strategis**

NO.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi (2017)	Target Akhir (2018)	Target Akhir (2019)	Target Akhir (2020)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8		9
1	Terselenggaranya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dan aset yang Efektif dan Efisien dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.	Terselenggaranya pengawasan pengelolaan keuangan dan aset yang efektif dan efisien.	Prosentase OPD yang pengelolaan Keuangannya sesuai ketentuan yang berlaku.	%	41,67 % (20 OPD)	52,08 % (25 OPD)	55,81% (30 OPD)	62,50% (35 OPD)	Target kinerja tahunan tujuan 1 dan 2 masih mengacu pada sebelum perubahan yaitu jumlah LHP, atas saran tim menpan direvisi menjadi OPD
			Prosentase OPD yang bebas dari penyimpangan yang material	%	41,67 % (20 OPD)	52,08 % (25 OPD)	55,81% (30 OPD)	62,50% (35 OPD)	
			Prosentase OPD yang pengelolaan asetnya sesuai ketentuan yang berlaku	%	41,67 % (20 OPD)	52,08 % (25 OPD)	55,81% (30 OPD)	62,50% (35 OPD)	
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SAKIP di Lingkungan Pemda Sulawesi Tengah.	Terwujudnya SAKIP yang efektif di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.	Prosentase OPD yang Evaluasi SAKIP nilainya B	%	41,67 % (20 OPD)	52,08 % (25 OPD)	55,81% (30 OPD)	62,50% (35 OPD)	
3.	Mempercepat proses penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan APEP.	Terwujudnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal .	Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan :						
			➤ Temuan BPK RI	%	70	65	74	76	
			➤ Temuan Itjen Depdagri	%	70	75	80	85	
			➤ Temuan Inspektorat Provinsi	%	70	75	80	85	



### 2.1.3. Strategi

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana sasaran tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi penetapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

#### ➤ Strategi

Sejalan dengan visi dan misi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ada dua hal yang akan dilaksanakan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu yang bersifat ke dalam (*inward*) dan ke luar (*outward*).

Ke dalam, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berupaya menata dan meningkatkan pelayanan serta kemampuan personil dalam rangka mendukung tugas operasional di bidang pengawasan.

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berupaya meningkatkan peranannya dalam rangka ikut menciptakan *good governance* dan *clean government* di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Peran Inspektorat perlu ditingkatkan melalui peningkatan kompetensi aparatur pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah antara lain dimaksudkan bahwa :

1. Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau Gubernur selaku Kepala Pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Pengawasan atas Penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan.

#### ➤ Kebijakan

- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan secara berkesinambungan.
- Menyusun Program Kegiatan Pengawasan yang berbasis Resiko.

- Meningkatkan mutu pengawasan, baik perencanaannya, Pelaksanaan dan Pelaporan Hasil Pengawasan.

➤ **Program**

Program-program yang ditetapkan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Tahun 2020 sebanyak 5 (Lima) program dan Kegiatan sebanyak 15 (Lima Belas) Kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengawasan Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan KDH.
4. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
5. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

➤ **Kegiatan**

1. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran.
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur.
4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur.
5. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
6. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
7. Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat.
8. Dukungan Kelancaran Evaluasi EKPPD
9. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
10. Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat.



### 2.3. Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Tahun 2020

Rencana kegiatan tahunan pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat digambarkan pada tabel 2.3.1 di bawah ini :

**Tabel 2.3.1**  
**Rencana Kegiatan Tahunan**

NO.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alat Ukur	Satuan	Target
1		2	4	5	6	7
1.	Terselenggaranya Pengelolaan dan Pertanggungjawaban keuangan dan asset yang efektif dilingkungan Pemda Provinsi Sulteng	Terselenggaranya Pengawasan pengelolaan keuangan dan asset yang efektif dan efisien.	- Prosentase OPD yang pengelolaan Keuangannya sesuai ketentuan yang berlaku	Hasil review LK OPD yang dilakukan oleh Inspektorat.	%	35 OPD
			- Prosentase OPD yang Bebas dari penyimpangan yang material.	Laporan Hasil audit BPK.	%	35 OPD
			- Prosentase OPD yang Pengelolaan asetnya sesuai ketentuan yang berlaku.	Laporan Hasil audit BPK.	%	35 OPD
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Prov. Sulawesi Tengah	Terwujudnya SAKIP yang efektif di Pemerintah Daerah Prov. Sulawesi Tengah.	- Prosentase OPD yang evaluasi SAKIP nilainya B.	Evaluasi LAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi	%	35 OPD
3.	Mempercepat proses penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan APEP.	Terwujudnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal .	Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan :	Hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan		
			- Temuan BPK RI	Internal dan	%	76
			- Temuan Itjen Depdagri	Eksternal	%	85
			- Temuan Inspektorat Provinsi		%	85

## 2.4 Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 digambarkan pada tabel 2.4.1 berikut ini :



Tabel 2.4.1  
Perjanjian Kinerja Tahun 2020

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)	PROGRAM/KEGIATAN (5)	STRATEGIS (6)	CAPAIAN TRIWULAN				KET (11)
						I (7)	II (8)	III (9)	IV (10)	
1	Terselenggaranya Pengawasan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang Efektif dan Efisien	1. Prosentase OPD yang Pengelolaan Keuangannya sesuai ketentuan yang berlaku	(35 OPD)	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH :		1.098.710.000,00	96.780.000,00	436.340.000,00	929.645.400,00	
		2. Prosentase OPD yang bebas dari Penyimpangan yang material	(35 OPD)							
		3. Prosentase OPD yang pengelolaan asset sesuai ketentuan yang berlaku	(35 OPD)							
2	Terwujudnya SAKIP yang efektif diLingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Prosentase OPD yang evaluasi SAKIP nilainya B	(35 OPD)	Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala		1.098.710.000,00	96.780.000,00	189.700.000,00	663.790.000,00	
3	Terwujudnya Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Internal dan eksternal	Prosentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Inspektorat Jendral Kemendagri, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota -Temuan BPK-RI -Ijen Kemendagri -Inspektorat	76% 80% 80%	Kegiatan : Monitoring tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Tindak lanjut temuan hasil pengawasan		-	-	212.730.000,00	58.650.000,00	

## 2.4. Anggaran Tahun 2020

Tahun Anggaran 2020 Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.17.272.523.831,55 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.12.310.641.352,55 dan Belanja Langsung sebesar Rp.4.961.882.479,00 Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 16.534.651.216,00 (95,73 persen) dengan rincian untuk belanja tidak langsung sebesar Rp.11.600.032.276,00 (94,23 persen) dan belanja langsung sebesar Rp. 4.934.618.940,00 (99,45 persen).



Gambar 1 : Anggaran Inspektorat Tahun 2020

### 2.5.1 Target Belanja

Target belanja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel 2.5.1 di bawah ini:

**Tabel 2.5.1**  
**Target Belanja Tahun 2019**

No	Uraian	Target (Rp)	Prosentase
1.	Belanja Tidak Langsung	12.310.641.352,55	71,27%
2.	Belanja Langsung	4.961.882.479,00	28,73%
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>17.272.523.831,55</b>	<b>100%</b>



### 2.5.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2020 Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

NO.	Sasaran Strategis	Anggaran	Prosentase	Ket
1	2	4	5	6
1	Terselenggaranya pengawasan pengelolaan keuangan dan asset yang efektif dan efisien	2.051.695.000,00	41,35 %	
2	Terwujudnya SAKIP yang efektif di lingkungan Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah			
3	Terwujudnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal	271.380.000,00	5,47 %	

### BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. Capaian Kinerja Tahun 2020

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Berdasarkan hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja dapat dilihat pada tabel 3.1.1 di bawah ini :

**Tabel 3.1.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	Merah

❖ Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah beserta target dan capaian realisasinya seperti yang terlihat pada tabel 3.2.2 yang dirinci sebagai berikut :



**Tabel 3.2.2**  
**Pengukuran Target Kinerja dan Realisasi Kinerja**  
**Tahun 2020**

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria/ Kode
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Terselenggaranya pengawasan pengelolaan keuangan dan aset yang efektif dan efisien	Prosentase OPD yang pengelolaan Keuangannya sesuai ketentuan yang berlaku	%	62,50% (35 OPD)	Tidak dilaksanakan pemeriksaan Reguler akibat refocusing pandemic covid-19	94,28 %	Sangat Baik
		Prosentase OPD yang bebas dari penyimpangan yang material	%	62,50 % (35 OPD)	Tidak dilaksanakan pemeriksaan Reguler akibat refocusing pandemic covid-19	94,28 %	Sangat Baik
		Prosentase OPD yang Pengelolaan asetnya sesuai ketentuan yang berlaku	%	62,50 % (35 OPD)	Tidak dilaksanakan pemeriksaan Reguler akibat refocusing pandemic covid-19	108,57 %	Sangat Baik
2	Terwujudnya SAKIP yang efektif dilingkungan Pemda Provinsi Sulawesi Tengah	Prosentase OPD yang evaluasi SAKIP nilainya B	%	62,50 % (35 OPD)	Tidak dilaksanakan pemeriksaan SAKIP akibat refocusing pandemic covid-19	111,42 %	Sangat Baik
3	Terwujudnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan	Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan :					
		➤ Temuan BPK RI	%	76	76	100 %	Sangat

	eksternal						Baik
	➤ Temuan Itjen Depdagri	%	80	100	125%		Sangat Baik
	➤ Temuan Inspektorat Provinsi	%	80	55,88	65%		Baik

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja sebagai tolok ukur dalam penilaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan 5 (lima) indikator kinerja tersebut diatas ada yang beberapa tidak dilaksanakan pemeriksaan seperti 1.) pengawasan pengelolaan keuangan dan aset yang efektif dan efisien, 2.) Terwujudnya SAKIP yang efektif dilingkungan Pemda Provinsi Sulawesi Tengah hal ini berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing kegiatan, Realokasi Anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor SE-5/K/D2/2020 tentang tata cara reviu atas refocusing kegiatan dan realokasi anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 903/180/BPKAD tanggal 1 April 2020 tentang Pemberitahuan Kebijakan Pergeseran APBD 2020 sehingga pemeriksaan regular dialihkan menjadi reviu atas refocusing kegiatan dan realokasi anggaran penanganan Covid-19 adapun capaian target penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan temuan BPK dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri telah mencapai ataupun melebihi target yang ditetapkan pada Rencana Strategis yang telah ditetapkan pada awal tahun adapun penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan temuan inspektorat belum mencapai target yaitu 85% disebabkan oleh persentase yang dihitung berdasarkan persentase penyelesaian tindak lanjut sedangkan yang Dalam Proses tindak lanjut sebanyak 21 tidak dimasukkan sehingga target yang ditentukan belum mencapai target yang telah ditetapkan. Beberapa target telah tercapai sesuai prosentase yang ditetapkan namun disisi lain masih ditemukan kendala yaitu tindak lanjut berupa penyetoran kerugian daerah ditempuh dengan



cara angsuran, beberapa kepala OPD telah memasuki masa pensiun dan telah meninggal dunia dan dilantik di OPD yang lain sehingga hal ini menimbulkan kendala tersendiri dalam penyelesaian tindak lanjut.

Terhadap permasalahan tersebut diatas perlu dilakukan pembinaan dan pendampingan terhadap seluruh OPD agar sasaran strategis OPD dapat tercapai sesuai target.

### 3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Dalam sub bab ini akan disajikan cara pencapaian sasaran strategis dengan capaian Indikator kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

**3.2.1. Sasaran 1** : Terselenggaranya pengawasan pengelolaan keuangan dan Asset yang efektif dan efisien.

**Tabel 3.2.3**  
**Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Terselenggaranya Pengawasan**  
**Pengelolaan Keuangan dan Aset Yang Efektif dan Efisien**

NO.	Indikator Kinerja	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra 2021	Capaian s/d 2019 terhadap 2020 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1.	Prosentase OPD yang pengelolaan Keuangannya sesuai ketentuan yang berlaku	64,70 % (33 OPD)	62,50% (35 OPD)	Tidak dilaksanakan pemeriksaan Reguler akibat refocusing pandemic covid-19	94,28	83,33% (40 OPD)	100%

Berdasarkan 35 (Tiga Puluh Lima) atau 62,50 prosentase OPD yang ditargetkan sesuai indikator yang ada yaitu prosentase OPD yang pengelolaan keuangannya sesuai ketentuan yang berlaku, tidak tercapai disebabkan oleh Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sehingga pemeriksaan reguler dialihkan menjadi reviu atas refocusing kegiatan dan realokasi anggaran dengan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing kegiatan, Realokasi Anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan penanganan

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor SE-5/K/D2/2020 tentang tata cara reviu atas refocusing kegiatan dan realokasi anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 903/180/BPKAD tanggal 1 April 2020 tentang Pemberitahuan Kebijakan Pergeseran APBD 2020 sehingga pemeriksaan regular dialihkan menjadi reviu atas refocusing kegiatan dan realokasi anggaran penanganan Covid-19 (sehingga realisasi yang terealisasi adalah sebanyak 33 (Tiga Puluh Tiga) OPD atau sebesar 94,28 persen dan prosentase capaiannya sebesar 94,28 persen dengan total OPD sebanyak 33 (Tiga Puluh Tiga) OPD. Adapun OPD yang dilakukan reviu terdiri 5 (lima) Tahapan Reviu dan Reviu RKA OPD 2021.

**Tabel 3.2.4**  
**Hasil Audit Atas Pengelolaan Keuangan dan Aset**

No	Nama OPD	2018	2019	2020
1	Biro Administrasi Wilayah Daerah dan Pemerintahan	R		-
2	Sekretariat DPRD		R	-
3	Badan Kepegawaian Daerah	R	TD	-
4	BAPPEDA		R	-
5	Inspektorat		TD	-
6	Badan PSDM		R	-
7	Badan Perpustakaan dan Kearsipan		R	-
8	Dinas Lingkungan Hidup			-
9	Badan Promosi, PM dan Perizinan		R	-
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan & PA		R	-
11	Badan Kesbangpol dan Linmas		TD	-
12	Dinas Pangan		R	-
13	Badan Penanggulangan Bencana			-
14	Bakorluh		-	-
15	BPKAD		R	-
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa		R	-
17	Badan Penelitian & Pengembangan Inovasi		R	-



No	Nama OPD	2018	2019	2020
18	Badan Pendapatan		R	-
19	Dinas Pariwisata			-
20	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura		R	
21	Dinas Kelautan & Perikanan	R		-
22	Dinas Kehutanan	R	R	-
23	Dinas Perkebunan & Peternakan	R	R	-
24	Dispora			-
25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		R	-
26	Dinas Sosial		R	-
27	Dinas Kesehatan		R	-
28	Disnakertrans		R	-
29	Dinas ESDM	R	R	-
30	Dinas Perhubungan	R		-
31	Dinas Kominfo			-
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		R	-
33	Dinas Koperasi dan UKM	R	R	-
34	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		R	-
35	Dinas Bina Marga dan Tata Ruang	R	TD	-
36	Dinas Cipta Karya & Sumber Daya Air	R	R	-
37	Dinas perumahan, kawasan pemukiman dan Pertanahan	R	R	-
38	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		R	-
39	Satpol PP	R	R	-
40	Biro Organisasi		R	-
41	Badan Penghubung Daerah di Jakarta		-	-
42	Biro Hukum	R	-	-
43	Biro Kesra	R		-
44	Biro Umum	R		-
45	Biro Perekonomian	R	-	-
46	Biro Administrasi OTDA	R	R	-
47	Biro Administrasi Pembangunan dan SDA	R	-	-
48	Biro HUMAS		R	-
49	UPT taman Mini	R	TD	-
50	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	-		-

No	Nama OPD	2018	2019	2020
51	Biro Administrasi Perekonomian & Pembangunan	R		-

❖ R : OPD yang pengelolaan keuangannya tidak sesuai SAP

❖ ■ : OPD yang pengelolaan keuangannya sesuai SAP

❖ TD : Tidak diperiksa

#### Permasalahan :

- Pada tahun 2020 seluruh OPD telah melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk percepatan penanganan corona virus disease 2019 namun belum sepenuhnya sesuai dengan tata cara aturan yang berlaku dikarenakan belum bisa dianalisis.
- Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa secara berkala (Rekap Harian, Mingguan, dan Bulanan)
- Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan belum memadai dimana masih terdapat penyedia yang belum melampirkan bukti kewajaran harga hal demikian tidak sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 13 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (Dinas Kesehatan);

#### Solusi :

- Melakukan pendampingan kepada 4 (Empat) OPD yang menangani COVID-19 sekaligus melakukan pembinaan dalam pengelolaan keuangan, penagadaan barang/jasa dan bansos sesuai peraturan yang berlaku.



Gambar 2: Grafik Indikator Kinerja Prosentase OPD yang pengelolaan Keuangannya



Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**3.2.2. Sasaran 2:** Terselenggaranya pengawasan pengelolaan keuangan dan aset yang efektif dan efisien.

**Tabel 3.2.5**  
**Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Terselenggaranya**  
**Pengawasan Pengelolaan keuangan dan Aset Yang Efektif dan Efisien**

NO.	Indikator Kinerja	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra 2021	Capaian s/d 2019 terhadap 2020 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
2.	Prosentase OPD yang bebas dari penyimpangan yang material	64,70 % (33 OPD)	62,50% (35 OPD)	Tidak dilaksanakan pemeriksaan Reguler akibat refocusing pandemic covid-19	94,28	83,3 % (40 OPD)	110 %

Berdasarkan 35 (tiga puluh lima) OPD yang ditargetkan tidak dapat terpenuhi melainkan dikarenakan tidak tercapai disebabkan oleh Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sehingga pemeriksaan reguler dialihkan menjadi reviu atas refocusing kegiatan dan realokasi anggaran dengan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing kegiatan, Realokasi Anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor SE-5/K/D2/2020 tentang tata cara reviu atas refocusing kegiatan dan realokasi anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 903/180/BPKAD tanggal 1 April 2020 tentang Pemberitahuan Kebijakan Pergeseran APBD 2020 sehingga pemeriksaan reguler dialihkan menjadi reviu atas refocusing kegiatan dan realokasi anggaran penanganan Covid-19 (sehingga realisasi yang terealisasi adalah sebanyak 33



(Tiga Puluh Tiga) OPD atau sebesar 94,28 persen dan prosentase capaiannya sebesar 94,28 persen dengan total OPD sebanyak 33 (Tiga Puluh Tiga) OPD. Adapun OPD yang dilakukan reviu terdiri 5 (lima) Tahapan Reviu dan Reviu RKA 2021.

**Tabel 3.2.6**  
**OPD dengan Temuan Penyimpangan Yang Material**

No	Nama OPD	2018	2019	2020
1	Biro Administrasi Wilayah Daerah dan Pemerintahan	M		-
2	Sekretariat DPRD			-
3	Badan Kepegawaian Daerah	M	TD	-
4	BAPPEDA		M	-
5	Inspektorat		TD	-
6	Badan PSDM			-
7	Badan Perpustakaan dan Kepustakaan			-
8	Badan Lingkungan Hidup			-
9	Badan Promosi, PM dan Perizinan			-
10	Badan Pemberdayaan Perempuan & PA			-
11	Badan Kesbangpol dan Linmas		TD	--
12	Badan Ketahanan Pangan			-
13	Badan Penanggulangan Bencana			-
14	Bakorluh		-	-
15	BPKAD			-
16	Dinas Pemberdayaan Masy Desa			-
17	Badan Penelitian & Pengembangan Inovasi			-
18	Badan Pendapatan			-
19	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif			-
20	Dinas Pertanian			-
21	Dinas Kelautan & Perikanan	M		-
22	Dinas Kehutanan	M		-
23	Dinas Perkebunan	M		-
24	Dikpora			-
25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			-
26	Dinas Sosial			-
27	Dinas Kesehatan			-



No	Nama OPD	2018	2019	2020
28	Disnakertrans		M	-
29	Dinas ESDM	M		-
30	Dinas Perhubungan	M		-
31	Dinas Kominfo			-
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			-
33	Dinas Koperasi dan UKM	M		-
34	Dinas Bina Marga & Tata Ruang	M	TD	-
35	Dinas Cipta Karya & SDA	M		-
36	Dinas perumahan, kawasan pemukiman dan Pertanahan	M		-
37	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	M		-
38	Satpol PP	M		-
39	Biro Organisasi			-
40	RS Undata			-
41	RS Madani			-
42	Badan Penghubung Daerah di Jakarta		TD	-
43	Biro Hukum	M		-
44	Biro Kesra	M		-
45	Biro Umum	M	M	-
46	Biro Perekonomian	M		-
47	Biro Administrasi OTDA	M		-
48	Biro Administrasi Pembangunan dan SDA	M		-
49	Biro HUMAS			-
50	UPT taman Mini	M	TD	-

❖ M : temuan Penyimpangan yang material

❖ ■ : tidak ada temuan Penyimpangan yang material

❖ TD : Tidak Diperiksa

❖ Permasalahan :

- Pada tahun 2020 seluruh OPD telah melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk percepatan penanganan corona virus disease 2019 namun belum sepenuhnya sesuai dengan tata cara aturan yang berlaku dikarenakan belum bisa dianalisis.

- Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa secara berkala (Rekap Harian, Mingguan, dan Bulanan)
- Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan belum memadai dimana masih terdapat penyedia yang belum melampirkan bukti kewajaran harga hal demikian tidak sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 13 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (Dinas Kesehatan);

❖ Solusi :

Melakukan pendampingan kepada 4 (Empat) OPD yang menangani COVID-19 sekaligus melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan asset, pengadaan barang/jasa dan bansos sesuai peraturan yang berlaku.



Gambar 3 : Indikator Kinerja OPD Yang Bebas dari Penyimpangan Material

Gambar 3. Menunjukkan tidak terpenuhinya realisasi dan capaian pada Tahun 2020 diketahui bersama dengan adanya Pandemic Covid-19 sehingga instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing kegiatan, Realokasi Anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sehingga peran serta Inspektorat sebagai Pembinaan dan Pengawasan melakukan reviu atas tahapan Refocusing kegiatan dan realokasi Anggaran agar sesuai dengan tata cara serta tahapan pelaksanaan yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.



**3.2.3. Sasaran 3** : Terselenggaranya pengawasan pengelolaan keuangan dan asset yang efektif dan efisien (lihat table 3.2.7). dibawah ini

**Tabel 3.2.7**  
**Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Terselenggaranya**  
**Pengawasan Pengelolaan Keuangan dan Aset Yang Efektif dan Efisien**

NO.	Indikator Kinerja	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra 2021	Capaian s/d 2019 terhadap 2020 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
3.	Prosentase OPD yang pengelolaan asetnya sesuai ketentuan yang berlaku	79 % (38 OPD)	62,50% (35 OPD)	Tidak dilaksanakan pemeriksaan Reguler akibat refocusing pandemic covid-19	108,57	83,3 % (40 OPD)	126 %

Berdasarkan 35 (tiga puluh lima) OPD yang ditargetkan dari 48 (Empat Puluh Delapan) total OPD yaitu prosentase OPD yang pengelolaan asetnya sesuai ketentuan yang berlaku, tidak terealisasi disebabkan oleh Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing kegiatan, Realokasi Anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sehingga peran serta Inspektorat sebagai Pembinaan dan Pengawasan melakukan reviu atas tahapan Refocusing kegiatan dan realokasi Anggaran agar sesuai dengan tata cara serta tahapan pelaksanaan yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku

**Tabel 3.2.8**  
**OPD Dengan Temuan Aset**

No	Nama OPD	2018	2019	2020
1	Biro Administrasi Wilayah Daerah dan Pemerintahan			-
2	Sekretariat DPRD			-
3	Badan Kepegawaian Daerah			-
4	BAPPEDA		A	-
5	Inspektorat			-
6	Badan Pengembangan SDM			-
7	Badan Perpustakaan dan Kepustakaan			-



No	Nama OPD	2018	2019	2020
8	Badan Lingkungan Hidup	A		-
9	Badan Promosi, PM dan Perizinan			-
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan & PA			-
11	Badan Kesbangpol dan Linmas			-
12	Dinas Pangan			-
13	Badan Penanggulangan Bencana	A		-
14	Dinas perkebunan dan peternakan	A		-
15	BPKAD	A		-
16	Dinas Pemberdayaan Masy Desa			-
17	Badan Penelitian & Pengembangan Inovasi			-
18	Badan Pendapatan			-
19	Dinas Pariwisata			-
20	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura			-
21	Dinas Kelautan & Perikanan			-
22	Dinas Kehutanan	A		-
23	Dinas Perkebunan		Dilebur	-
24	Dispora			-
25	Dinas Pendidikan		A	-
26	Dinas Sosial		A	-
27	Dinas Kesehatan			-
28	Disnakertrans			-
29	Dinas ESDM			-
30	Dinas Perhubungan			-
31	Dinas Kominfo			-
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			-
33	Dinas Koperasi dan UKM			-
34	Dinas Peternakan dan Keswan		Dilebur	-
35	Dinas Bina Marga dan Tata Ruang			-
36	Dinas Cipta Karya			-
37	Dinas perumahan, kawasan pemukiman dan Pertanahan			-
38	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	A		-
39	Satpol PP	A		-
40	Biro Organisasi			-
41	RS Undata	A		-



No	Nama OPD	2018	2019	2020
42	RS Madani	A		-
43	Badan Penghubung Daerah di Jakarta	A		-
44	Biro Hukum	A		-
45	Biro Kesra			-
46	Biro Umum			--
47	Biro Perekonomian	A		-
48	Biro Administrasi OTDA	A		-
49	Biro Administrasi Pembangunan dan SDA			-
50	Biro HUMAS			-
51	UPT taman Mini	A		-

❖ A: temuan aset

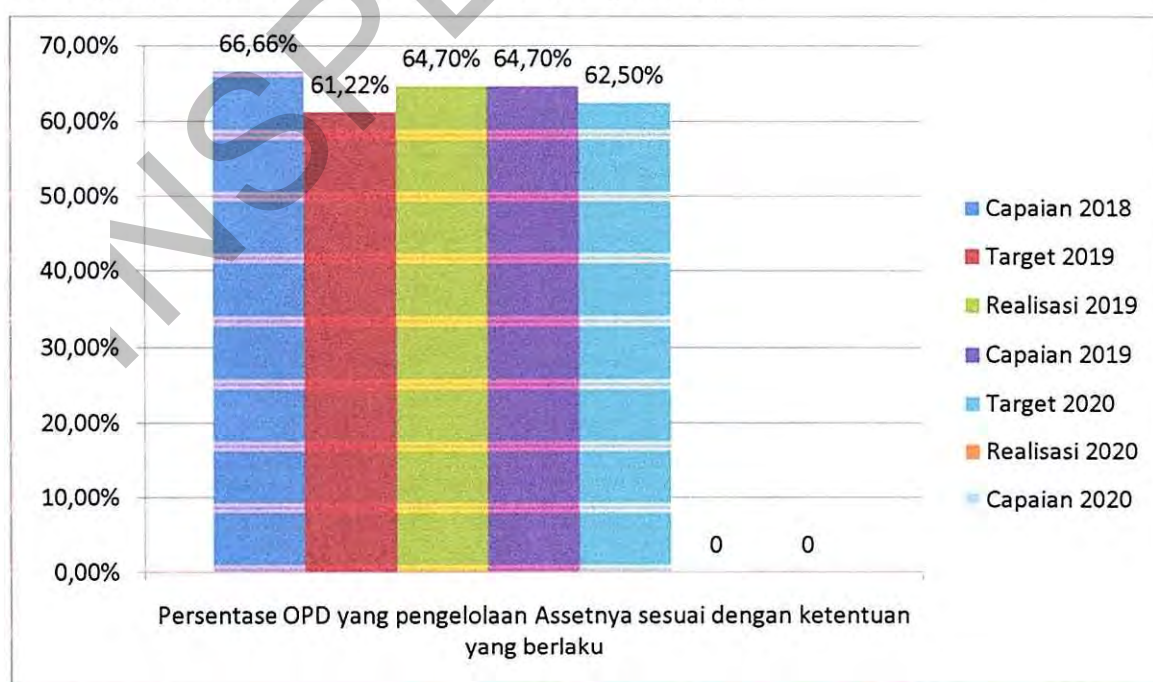
❖ ■ : tidak ada temuan aset

Permasalahan :

Pengelolaan aset pada OPD belum dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, hal ini disebabkan oleh pengelola aset khususnya pengurus barang belum mempunyai kompetensi dalam penguasaan teknologi penataan dan pengelolaan aset.

Solusi :

Melakukan pendampingan kepada seluruh OPD dalam Pengelolaan aset atau Barang Milik Daerah sesuai peraturan yang berlaku.



Gambar 4 : Indikator Kinerja OPD yang Pengelolaan Asetnya Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.

**3.2.4. Sasaran 4 :** Terwujudnya SAKIP yang efektif dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (lihat tabel 3.2.9).

**Tabel 3.2.9**  
**Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Terwujudnya SAKIP Yang Efektif**

NO.	Indikator Kinerja	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra 2021	Capaian s/d 2019 terhadap 2020 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
4.	Prosentase OPD yang Evaluasi SAKIP nilainya B	81,25 % (39 OPD)	62,50 % (35 OPD)	Tidak dilaksanakan pemeriksaan Reguler akibat refocusing pandemic covid-19	111	83,33% (40 OPD)	130 %

Berdasarkan 48 (empat puluh delapan) total OPD termasuk Biro pada SEKDA yang ditargetkan sekitar 35 OPD (62,50 Persen) OPD dan Biro yaitu prosentase OPD dan Biro yang evaluasi SAKIP nilainya B, tidak terealisasi dikarenakan Refocusing kegiatan, Realokasi Anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sehingga peran serta Inspektorat sebagai Pembinaan dan Pengawasan melakukan reviu atas tahapan Refocusing kegiatan dan realokasi Anggaran agar sesuai dengan tata cara serta tahapan pelaksanaan yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku

**Tabel 3.2.10**  
**OPD Dengan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2018 dan 2019**

No	Nama OPD	2018	2019	2020
1	Biro OTDA	B	B	-
2	Sekretariat DPRD	B	B	-
3	Badan Kepegawaian Daerah	B	B	-
4	BAPPEDA	B	BB	-
5	Inspektorat	B	B	-



No	Nama OPD	2018	2019	2020
6	Badan Pengembangan SDM	B	B	-
7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	BB	CC	-
8	Dinas Lingkungan Hidup	B	B	-
9	Dinas PMPTSP	BB	BB	-
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan & PA	BB	B	-
11	Badan Kesbangpol dan Linmas	B	B	-
12	Dinas Pangan	B	BB	-
13	Badan Penanggulangan Bencana	B	B	-
14	Bakorluh	B	-	-
15	BPKAD	B	B	-
16	Dinas Pemberdayaan Masy & Desa	B	B	-
17	Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi	B	B	-
18	Dinas Bina Marga dan penataan ruang	BB	BB	-
19	Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya air	B	B	-
20	Dinas Sumber Daya Air	B	-	-
21	Badan Pendapatan	B	CC	-
22	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif	B	BB	-
23	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	B	BB	-
24	Dinas Kelautan & Perikanan	BB	BB	-
25	Dinas Kehutanan	B	BB	-
26	Dinas Perkebunan dan peternakan	B	BB	-
27	Dispora	CC	B	-
28	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	B	B	-
29	Dinas Sosial	B	BB	-
30	Dinas Kesehatan	B	B	-
31	Disnakertrans	B	B	-
32	Dinas ESDM	B	BB	-
33	Dinas Perhubungan	B	BB	-
34	Dinas Komunikasi, informatika, persediaan dan statistic	B	B	-
35	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	B	B	-
36	Dinas Koperasi dan UKM	B	B	-

No	Nama OPD	2018	2019	2020
37	Satpol PP	B	B	--
38	RSUD Madani	B	-	-
39	RSUD Undata	B	-	-
40	Biro HUMAS dan Protokol	B	B	-
41	Biro Administrasi Pembangunan dan SDA	B	-	-
42	Biro Umum SEKDA	BB	BB	-
43	Biro Administrasi Perekonomian & Pembangunan SEKDA	CC	B	-
44	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kesramas	B	CC	-
45	Biro Hukum SEKDA	BB	B	-
46	Biro Administrasi Wilayah Daerah dan Pemerintahan	B	B	-
47	Biro Organisasi SEKDA	B	BB	-
48	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	-	B	-
49	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	CC	-
50	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	-	CC	-
51	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	CC	--

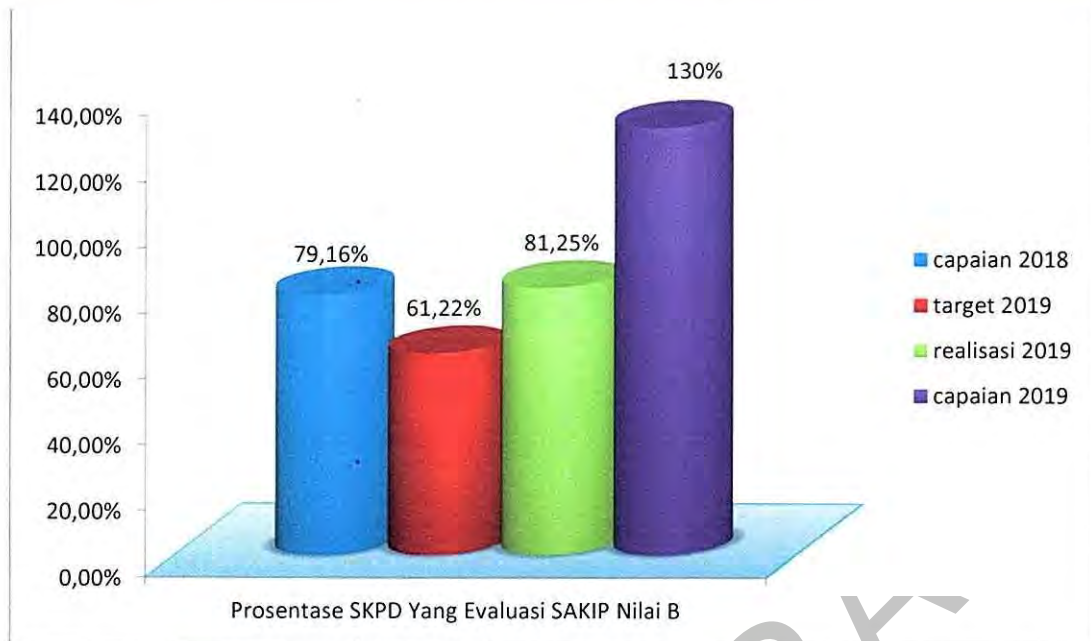
Permasalahan :

Aparatur Sipil Negara (ASN) di setiap Organisasi Perangkat Daerah belum sepenuhnya memahami Tugas Pokok dan Fungsi terhadap SAKIP yang memenuhi kriteria SMART, hanya berdasarkan persepsi dan *judgment* masing-masing ASN di OPD.

Solusi :

Peningkatan kompetensi dan pemahaman yang memadai bagi para ASN hal ini membutuhkan pendampingan baik dari BPKP maupun dari Kemenpan dan RB serta Inspektorat selaku sebagai Pembinaan dan Pengawasan sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas evaluasi SAKIP di setiap OPD.





Gambar 5 : Indikator Kinerja Prosentase OPD yang Evaluasi SAKIP Nilai B

**3.2.5. Sasaran 5:** Terwujudnya Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi hasil Pemeriksaan internal dan eksternal (lihat tabel 3.2.11).

**Tabel 3.2.11**  
**Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Terwujudnya**  
**Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan**  
**Internal dan Eksternal**

NO.	Indikator Kinerja	Capaian 2019 (%)	2020			Target Akhir Renstra 2021 (%)	Capaian s/d 2019 terhadap 2020 (%)
			Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian		
5.	Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan :						
	➤ Temuan BPK RI	74%	76	76	100 %	80	100 %
	➤ Temuan Itjen Depdagri	100%	85	100	125%	90	125%
	➤ Temuan Inspektorat Provinsi	72%	85	55,88	66, %	90	66%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Penyelesaian Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan baik atas pemeriksaan BPK–RI maupun Itjen Depdagri telah mencapai capai target adapun target Inspektorat Daerah Provinsi

Sulawesi Tengah belum mencapai target sesuai yang diharapkan. Hal ini disebabkan beberapa kendala, antara lain :

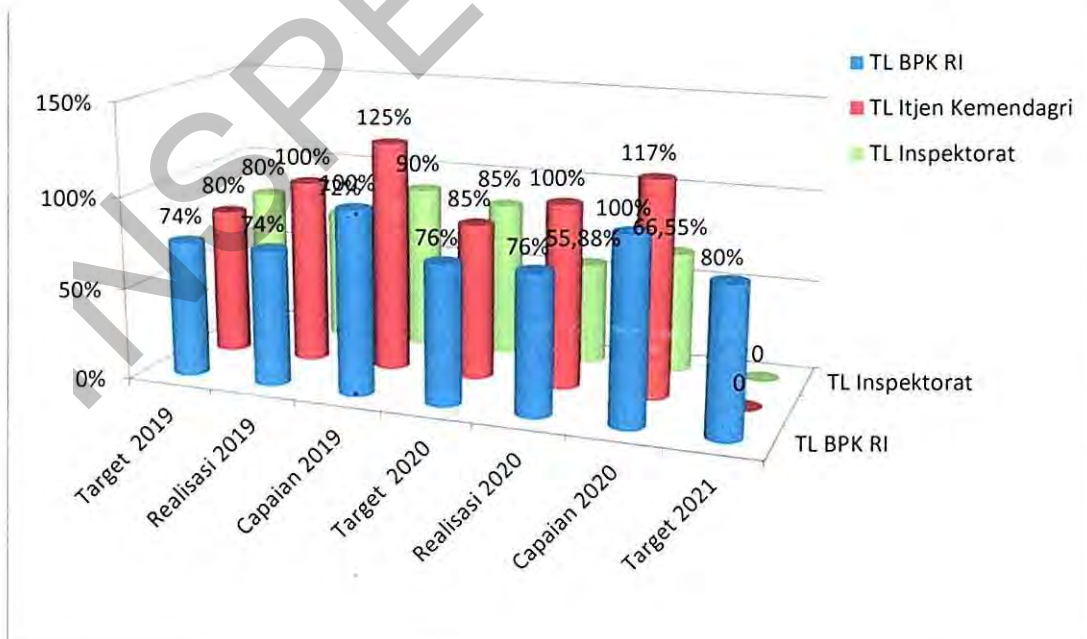
1. Tindak Lanjut berupa penyetoran kerugian daerah ditempuh dengan cara angsuran.
2. Beberapa Pejabat yang terkait temuan yang menyangkut kerugian daerah mengalami mutasi ke OPD lain.
3. ASN yang terdapat temuan kerugian telah memasuki masa pensiun dan ada yang telah meninggal dunia.
4. Tidak adanya partisipasi yang aktif dari ASN yang dilantik di OPD untuk memberikan tanggapan LHP maupun tindak lanjut terkait temuan administratif untuk perbaikan kedepannya

Permasalahan :

Partisipasi secara aktif dari obyek yang diperiksa belum optimal dalam menindaklanjuti rekomendasi temuan hasil pemeriksaan baik internal maupun eksternal.

Solusi :

Perlu ditingkatkan frekuensi pelaksanaan pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan baik eksternal maupun internal.





Gambar 6 : Indikator Kinerja Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal sebagai Berikut :

- a) Temuan BPK RI.
- b) Temuan ITJEN DEPDAGRI.
- c) Temuan INSPEKTORAT PROVINSI.

### 3.3. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2020 sebesar Rp. 4.961.882.479,00 (28,73 persen) dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp. 2.561.565.400,00 (99,81 persen).

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran masih sangat kurang, hal ini perlu mendapat perhatian dan dukungan dari berbagai pihak terutama bagi pengambil kebijakan sehingga kinerja Inspektorat dimasa yang akan datang lebih baik.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel 3.1.12 berikut di bawah ini sebagai berikut :

**Tabel 3.1.12**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Per Sasaran Tahun 2020**

No	Sasaran	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Realisasi
1.	Terselenggaranya pengawasan pengelolaan keuangan dan asset yang efektif dan efisien	62,50% (35 OPD)	Pemeriksaan Reguler Tidak ada akibat Refocusing Pandemic Covid-19	94,28 %	2.051.695.000,-	2.048.980.000,-	99,87 %
		62,50% (35 OPD)	Pemeriksaan Reguler Tidak ada akibat Refocusing Pandemic Covid-19	94,28 %			

No	Sasaran	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Realisasi
		62,50% (35 OPD)	Pemeriksaan Reguler Tidak ada akibat Refocusing Pandemic Covid-19	108,57 %			
2.	Prosentase OPD yang Evaluasi SAKIP nilainya B	62,50% (35 OPD)	Pemeriksaan Reguler Tidak ada akibat Refocusing Pandemic Covid-19	111 %			
3.	Terwujudnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal				271.380.000	271.380.000	100 %
	➤ Temuan BPK	76	76	100 %			
	➤ Temuan Itjen KDM	80	100	125 %			
	➤ Temuan Inspektorat Provinsi	80	55,88	65 %			
<b>Jumlah</b>					<b>2.566.340.400</b>	<b>2.561.565.400</b>	<b>99,81 %</b>



## BAB. IV PENUTUP

### 4.1. KESIMPULAN.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2020, serta Penetapan Kinerja Tahun 2020 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 (tiga) sasaran, ditetapkan indikator kinerja sasaran sebanyak 5 (lima) indikator.

Penyelenggaraan kegiatan di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun Anggaran 2020 merupakan tahun ke 4 (Empat) rencana strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017-2021. Dalam kurun waktu pelaksanaan program dan kebijakan yang telah ditetapkan tersebut masih ada yang belum mencapai target dan menemui hambatan sehingga hal tersebut perlu mendapat perhatian dan dukungan serta perlu diantisipasi dari berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kualitas dan kuantitas APIP di lingkup Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah belum memadai disebabkan formasi rekrutmen calon auditor dan P2UPD/aparat pengawas/pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang tidak sesuai kebutuhan, sehingga mempengaruhi pencapaian kinerja.
2. Kurangnya keikutsertaan auditor dan P2UPD untuk mengikuti Sosialisasi dan Diklat-diklat yang menunjang intuisi dari pada seorang Auditor dan P2UPD tersebut, karena disebabkan oleh terbatasnya anggaran untuk peningkatan Sumber Daya dari Auditor dan P2UPD tersebut.

3. Masih kurangnya perhatian dari OPD dalam menindak lanjuti temuan hasil pemeriksaan baik itu pemeriksaan BPK RI maupun temuan Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Masih kurangnya SDM ASN di Lingkup Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Provinsi Sulawesi Tengah dalam memahami Tugas dan Fungsi dalam menerapkan Kebijakan Visi dan Misi Gubernur Sulawesi Tengah.

Terhadap hambatan tersebut diatas, perlu adanya penyelesaian yaitu :

1. Komitmen Pimpinan sangat dibutuhkan dalam rangka upaya peningkatan dan pengembangan sumber daya aparatur pengawasan, serta formasi rekrutmen pegawai yang sesuai kebutuhan.
2. Adanya komitmen dan perhatian para kepala OPD dalam mempercepat proses penyelesaian temuan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut dengan cara berkoordinasi dengan aparat pengawas internal dan membentuk Tim Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang ada di OPD.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan, serta adanya solusi dari masalah selama 1 (satu) tahun kegiatan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palu, Januari 2020

INSPEKTUR DAERAH

PROVINSI SULAWESI TENGAH



**Drs. M. MUCHLIS., MM**  
**Pembina Utama Madya**  
NIP. 19710222 199012 1 001



# **LAMPIRAN**

MATRIKS EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2020  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

"TABEL. T-C. 19  
PERMENDAGRI  
86 TAHUN 2017

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi dan Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		KET
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	INSPEKTORAT DAERAH PROV. SULTENG								
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran	100	1.267.110.807	99,06	1.255.182.398	99,06	1.255.182.398	
	Kegiatan :								
	1. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar	Terlaksananya Koordinasi, Konsultasi, Rumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Program Kegiatan	100	190.065.528	100,00	190.065.528	100,00	190.065.528	
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Terlaksananya Jasa Pelayanan Perkantoran	100	1.077.045.279	98,89	1.065.116.870	98,89	1.065.116.870	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	874.661.272	98,80	864.151.142	98,80	864.151.142	
	Kegiatan :								
	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100	106.600.000	96,57	102.941.894	96,57	102.941.894	
	2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	768.061.272	99,11	761.209.248	99,11	761.209.248	
3	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggara Pemda	3	2.566.340.400	3	2.561.565.400	3,00	2.561.565.400	
	Kegiatan :								
	1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan, tenwujudnya Efisien, efektif, dan akuntabilitas Penyelenggaraan Pemda	35 OPD	2.051.695.000	35 OPD	2.048.980.000	35 OPD	2.048.980.000	
	2. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, Itjen Kemendagri, Inspektorat Provinsi	76%	271.380.000	76%	271.380.000	76%	271.380.000	
	3. Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif	Tenwujudnya peta pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Prov. Sulteng	-	-	-	-	-	-	
	4. Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat	Terlaksananya penyelesaian laporan pengaduan Masyarakat	10 LHP	66.600.000	10 LHP	64.600.000	10 LHP	64.600.000	





MATRIKS EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2020  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

TABEL T.C-19  
PERMENDAGRI  
NO. 86 TAHUN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja (RPJMD pada tahun 2021 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi dan Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2020 (%)		KET
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	INSPEKTORAT DAERAH PROV. SUL TENG		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran	100	1.122.770.000	97,38	2.065.899.968	100	1.267.110.807	99,06	1.255.182.398	99,06	1.255.182.398	99,06	1.255.182.398	
	Kegiatan:														
	1. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar	Terlaksananya Koordinasi, Konsultasi, Rumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Program Kegiatan	100	770.000	99,09	1.045.340.677	100	1.90.065.528	100,00	1.90.065.528	100,00	1.90.065.528	100	1.90.065.528	
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Terlaksananya Jasa Pelayanan Perkantoran	100	1.122.000.000	95,68	1.010.559.291	100	1.077.045.279	98,89	1.065.116.870	98,89	1.065.116.870	98,89	1.065.116.870	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	1.738.000.000	99,70	1.882.363.830	100	874.661.272	98,80	864.151.142	98,80	864.151.142	98,80	864.151.142	
	Aparatur :														
	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100	1.188.000.000	99,83	1.459.960.400	100	1.06.600.000	96,57	102.941.894	96,57	102.941.894	96,57	102.941.894	
	2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terperuhnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	550.000.000	99,23	422.403.430	100	768.061.272	99,11	761.209.248	99,11	761.209.248	99,11	761.209.248	
3	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggara Pemda	LHP%/Dok	4.548.500.000	98,14	3.610.942.600	LHP%/Dok	2.566.340.400	LHP%/Dok	2.561.565.400	LHP%/Dok	2.561.565.400	LHP%/Dok	2.561.565.400	
	Kegiatan:														
	1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan, terwujudnya Efisien, efektif, dan akuntabilitas Penyelenggaraan Pemda	40 OPD	3.872.000.000	30 OPD	2.996.125.000	35 OPD	2.051.695.000	35 OPD	2.048.980.000	35 OPD	2.048.980.000	35 OPD	2.048.980.000	
	2. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, ljen Kemendagri, Inspektoral Provinsi	80%	126.500.000	74%	213.310.000	76%	271.380.000	76%	271.380.000	76%	271.380.000	76%	271.380.000	
	3. Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif	Terwujudnya pola pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Prov. Sulieng	2 Dok	110.000.000	2 Dok	70.942.600	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4. Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat	Terlaksananya penyelesaian laporan pengaduan Masyarakat	10 LHP	110.000.000	10 LHP	76.725.000	10 LHP	66.600.000	10 LHP	64.600.000	10 LHP	64.600.000	10 LHP	64.600.000	
	5. Dukungan Kelancaran Evaluasi EKPPD	Terlaksananya Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kab/Kota	13 LHE	330.000.000	13 LHP	252.840.000	13 LHP	176.665.400	13 LHP	176.605.400	13 LHP	176.605.400	13 LHP	176.605.400	
4	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengawasan	104 Org	550.000.000	94 Org	238.216.400	104 Org	19.025.000	104 Org	19.025.000	104 Org	19.025.000	104 Org	19.025.000	
	Kegiatan														
1	Peatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Terperuhnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	104 Org	550.000.000	94 Org	238.216.400	104 Org	19.025.000	104 Org	19.025.000	104 Org	19.025.000	104 Org	19.025.000	



5	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Inventarisasi Pengaduan Masyarakat dan Laporan Inpre No. 5 Tahun 2004	1 Dok	577.933.504	1 Dok	438.078.200	1 Dok	234.745.000	1 Dok	234.695.000	1 Dok	234.695.000	
	Kegiatan												
1	Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	Terlaksananya Inventarisasi Pengaduan Masyarakat dan Laporan Inpres No 5 Tahun 2004	1 Dok	577.933.504	1 Dok	438.078.200	1 Dok	234.745.000	1 Dok	234.695.000	1 Dok	234.695.000	
				8.537.203.504		8.225.500.998		4.961.882.479		4.934.618.940		4.934.618.940	

INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

  
Drs. M. MUCHLIS, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19710222 199012 1 001



DAFTAR REVIU RKA OPD TAHUN ANGGARAN 2021

NO	WILAYAH PEMERIKSAAN	NOMOR LHP	JENIS PEMERIKSAAN	KUALIFIKASI KEPATUHAN		
				BAIK	SEDANG	KURANG
1	2	3	4	5	6	7
1	WILAYAH II	708/112/LHR/RKA/PST/RHS/XI/20/ITDA	LHR RKA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SULAWESI TENGAH			√
2	WILAYAH II	708/116/LHR/RKA/PST/RHS/XI/20/ITDA	LHR RKA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH		√	
3	WILAYAH II	708/108/LHR/RKA/PST/RHS/XI/20/ITDA	LHR RKA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB PROVINSI SULAWESI TENGAH			√
4	WILAYAH II	708/109/LHR/RKA/PST/RHS/XI/20/ITDA	LHR RKA DINAS KOMINFO, PERSANDIAN, DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH			√
5	WILAYAH II	708/137/LHR/RKA/PST/RHS/XI/20/ITDA	LHR RKA BIRO PEMBANGUNAN SEKERTARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	√		
6	WILAYAH II	708/110/LHR/RKA/PST/RHS/XI/20/ITDA	LHR RKA BIRO EKONOMI SEKERTARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH		√	
7	WILAYAH II	708/107/LHR/RKA/PST/RHS/XI/20/ITDA	LHR RKA DINAS PEMUDA DAN OLARAGA PROVINSI SULAWESI TENGAH			√
8	WILAYAH II	708/106/LHR/RKA/PST/RHS/XI/20/ITDA	LHR RKA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH		√	
9	WILAYAH II	708/111/LHR/RKA/PST/RHS/XI/20/ITDA	LHR RKA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH		√	
10	WILAYAH II	708/114/LHR/RKA/PST/RHS/XI/20/ITDA	LHR RKA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH		√	
11	WILAYAH II	708/117/LHR/RKA/PST/RHS/XI/20/ITDA	LHR RKA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI TENGAH	√		
12	WILAYAH II	708/118/LHR/RKA/PST/RHS/XI/20/ITDA	LHR RKA BIRO UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH		√	
13	WILAYAH II	708/119/LHR/RKA/PST/RHS/XI/20/ITDA	LHR RKA BIRO ADM. KESEJAHTERAAN SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGAH		√	



DAFTAR REVIU RKA OPD TAHUN ANGGARAN 2021

NO	WILAYAH PEMERIKSAAN	NOMOR LHP	JENIS PEMERIKSAAN	KUALIFIKASI KEPATUHAN		
				BAIK	SEDANG	KURANG
1	2	3	4	5	6	7
1	WILAYAH I	708/95/LHR/RKA/PST/RHS/XI/20/ITDA	LHR RKA BIRO HUKUM SEKERTARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	✓		
2	WILAYAH I	708/99/LHR/RKA/PST/RHS/XI/20/ITDA	LHR RKA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SULAWESI TENGAH		✓	
3	WILAYAH I	708/105/LHR/RKA/PST/RHS/XI/20/ITDA	LHR RKA BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	✓		
4	WILAYAH I	708/92/LHR/RKA/PST/RHS/XI/20/ITDA	LHR RKA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH		✓	
5	WILAYAH I	708/90/LHR/RKA/PST/RHS/XI/20/ITDA	LHR RKA Cipta Karya dan Sumber Daya Air Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	✓		
6	WILAYAH I	708/101/LHR/RKA/PST/RHS/XI/20/ITDA	LHR RKA DINAS BINAMARGA DAN PENATAAN RUANG DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH			✓
7	WILAYAH I	708/93/LHR/RKA/PST/RHS/XI/20/ITDA	LHR RKA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH		✓	
8	WILAYAH I	708/94/LHR/RKA/PST/RHS/XI/20/ITDA	LHR RKA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGAH	✓		
9	WILAYAH I	708/96/LHR/RKA/PST/RHS/XI/20/ITDA	LHR RKA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	✓		
10	WILAYAH I	708/97/LHR/RKA/PST/RHS/XI/20/ITDA	LHR RKA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SULAWESI TENGAH	✓		
11	WILAYAH I	708/98/LHR/RKA/PST/RHS/XI/20/ITDA	LHR RKA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH		✓	
12	WILAYAH I	708/100/LHR/RKA/PST/RHS/XI/20/ITDA	LHR RKA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	✓		
13	WILAYAH I	708/103/LHR/RKA/PST/RHS/XI/20/ITDA	LHR RKA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH		✓	
14	WILAYAH I	708/91/LHR/RKA/PST/RHS/XI/20/ITDA	LHR RKA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	✓		
15	WILAYAH I	708/102/LHR/RKA/PST/RHS/XI/20/ITDA	LHR RKA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH		✓	

DAFTAR REVIU RKA OPD TAHUN ANGGARAN 2021

NO	WILAYAH PEMERIKSAAN	NOMOR LHP	JENIS PEMERIKSAAN	KUALIFIKASI KEPATUHAN		
				BAIK	SEDANG	KURANG
1	2	3	4	5	6	7
1	WILAYAH III	708/127/LHR/RKA/PST/RHS/XI/20/ITDA	LHR RKA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH		√	
2	WILAYAH III	708/122/LHR/RKA/PST/RHS/XI/20/ITDA	LHR RKA DINAS SOSIAL DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	√		
3	WILAYAH III	708/138/LHR/RKA/PST/RHS/XI/20/ITDA	LHR RKA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH			√
4	WILAYAH III	708/133/LHR/RKA/PST/RHS/XI/20/ITDA	LHR RKA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH			√
5	WILAYAH III	708/129/LHR/RKA/PST/RHS/XI/20/ITDA	LHR RKA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PROVINSI SULAWESI TENGAH			√
6	WILAYAH III	708/126/LHR/RKA/PST/RHS/XI/20/ITDA	LHR RKA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH			√
7	WILAYAH III	708/134/LHR/RKA/PST/RHS/XI/20/ITDA	LHR RKA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	√		
8	WILAYAH III	708/130/LHR/RKA/PST/RHS/XI/20/ITDA	LHR RKA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH		√	
9	WILAYAH III	708/138/LHR/RKA/PST/RHS/XI/20/ITDA	LHR RKA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH		√	
10	WILAYAH III	708/121/LHR/RKA/PST/RHS/XI/20/ITDA	LHR RKA DINAS PANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH		√	
11	WILAYAH III	708/132/LHR/RKA/PST/RHS/XI/20/ITDA	LHR RKA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	√		
12	WILAYAH III	708/131/LHR/RKA/PST/RHS/XI/20/ITDA	LHR RKA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SULAWESI TENGAH	√		
13	WILAYAH III	708/123/LHR/RKA/PST/RHS/XI/20/ITDA	LHR RKA BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI PROVINSI SULAWESI TENGAH		√	
14	WILAYAH III	708/125/LHR/RKA/PST/RHS/XI/20/ITDA	LHR RKA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH		√	